



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170 / 12 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

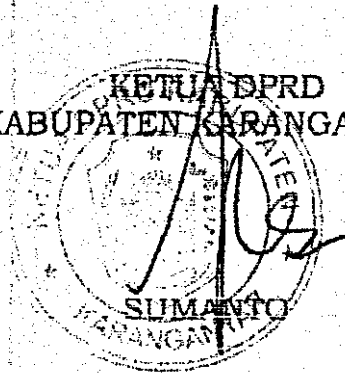
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 November 2018

KETUA DPRD  
KABUPATEN KARANGANYAR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 170/12 TAHUN 2018  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH TAHUN 2019

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

NO (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAK- SANAAN (5)	DISERTAI (6)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENYAM- PAIAN (8)	KETERANGAN (9)
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL	- Perlindungan pedagang pasar - Pemberdaya an pedagang pasar	Baru		2019	Naskah Akademik		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Oktober 2019	Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
2.	LEMBAGA KOPERASI SIMPAN PINJAM	- Penerbitan ijin usaha - Penerbitan pembukaan kantor	Baru		2019	Naskah Akademik		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Oktober 2019	Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		cabang, cabang pembantu, dan kantor kas - Pemeriksaan dan pengawasan - Penilaian kesehatan koperasi							
3.	RENCANA PEMBANGUNAN- JANGKA MENENGAH DAERAH 2018-2023	Visi - Misi dan Program Bupati 2018-2023	Baru	2019		Penjelasan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Februari 2019	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
4.	KAWASAN TANPA ASAP ROKOK	- Kriteria Kawasan Tanpa Asap Rokok - Larangan - Sanksi - Zonasi	Baru	2019	Naskah Akademik		Dinas Kesehatan	Agustus 2019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA	Perubahan sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Antara lain : a. Hak Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa; b. Kedudukan keuangan Perangkat Desa	Ubah	2019	Penjelasan	1. Pemerintahan Desa 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Februari 2019	
6.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNI- KASI	- Zonasi Perijinan Pengendalian - Asuransi dan dana sosial agar dispesifikasi- kan - Menghapus ketentuan izin gangguan	Ubah	2019	Penjelasan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Agustus 2019	Kemendagri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Izin Gangguan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	IZIN REKLAME DAN PENGELOLAAN REKLAME	- Nilai Jual Reklame - Izin Reklame - Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2006	Baru	2019	Naskah Akademik		1. Badan Keuangan Daerah 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Agustus 2019	- Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2006 - Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
8.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKAT -AN DESA	Perubahan Peraturan Daerah menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaraka- tan Desa dan		Ubah	2019		Penjelasan	Agustus 2019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Lembaga Adat Desa, cukup diatur dengan Peraturan Bupati							
9.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	- Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman - Hasil Evaluasi kelembagaan	Ubah	2019		Penjelasan	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan 4. Dinas Peternakan	Agustus 2019	Ada analisa Kajian susunan Perangkat Daerah
10.	TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru	2019		Penjelasan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Agustus 2019	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 376 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN (RDTRK)	Tindak Lanjut Perda Tata Ruang	Baru	2019	Naskah Akademik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Agustus 2019	Perpres Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
12.	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH	Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Baru	2019		Penjelasan	Semua Perangkat Daerah Mengeluarkan Perizinan		Tindak Lanjut Pelaksanaan OSS



**DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA**

NO (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAK- SANAAN (5)	DISERTAI (6)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENYAMPAIAN (8)	KETERANGAN (9)
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Baru		2019		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober 2019	- Rutin; - Pasal 239 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan
		b. Pertanggungjawa- ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018;	Baru		2019		Penjelasan		Maret 2019	
		c. Perubahn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019		Ubah		2019		Penjelasan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p>
2.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindak-lanjuti putusan Mahkamah Agung						<p>Pasal 239 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

KABUPATEN KARANGANYAR,  
KABUPATEN KARANGANYAR,  
SUMANTO